



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

LAMPIRAN

SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK  
NOMOR SE-65/PJ/2012

TENTANG

TATA CARA PENANGANAN SIDANG BANDING DAN GUGATAN  
DI PENGADILAN PAJAK

Lampiran I  
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak  
Nomor : SE-65/PJ/2012  
Tanggal : 28 Desember 2012

SUSUNAN TIM SIDANG BANDING DAN GUGATAN  
SUBDIT/BIDANG .....<sup>1)</sup>

Tim	Nama	NIP	Jabatan	Majelis	Harsinom
... <sup>2)</sup>	..... <sup>3)</sup> .....	..... <sup>4)</sup> .....	..... <sup>5)</sup> .....	..... <sup>6)</sup> .....	..... <sup>7)</sup> .....

.....<sup>8)</sup>

.....<sup>9)</sup>  
NIP

Petunjuk Pengisian Lampiran I:

- Angka 1 : diisi dengan nama jabatan penyusun Tim Sidang
- Angka 2 : diisi dengan nomor urut Tim Sidang
- Angka 3 : diisi dengan nama anggota Tim Sidang
- Angka 4 : diisi dengan NIP anggota Tim Sidang
- Angka 5 : diisi dengan jabatan anggota Tim Sidang
- Angka 6 : diisi dengan nomor Majelis
- Angka 7 : diisi dengan hari sidang normal
- Angka 8 : diisi dengan tanggal ditetapkan
- Angka 9 : diisi dengan tanda tangan, nama, dan NIP pejabat penyusun Tim

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

.....<sup>1)</sup>

---

Nomor : .....<sup>2)</sup> .....<sup>3)</sup>  
Sifat : Segera  
Lampiran : .....<sup>4)</sup> set  
Hal : Surat Uraian Banding atas Pengajuan Banding terhadap  
Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak  
Nomor : .....<sup>5)</sup>  
Tanggal : .....<sup>6)</sup>  
Tentang : .....<sup>7)</sup>  
Nomor skp/Bukti Potong : .....<sup>8)</sup>  
Tanggal : .....<sup>9)</sup>  
Masa/Tahun Pajak : .....<sup>10)</sup>  
Atas nama : .....<sup>11)</sup>  
NPWP/NOP : .....<sup>12)</sup>  
Nomor Sengketa Pajak : .....<sup>13)</sup>

**Yth. Sekretaris Pengadilan Pajak  
Gedung Sutikno Slamet Kementerian Keuangan  
Jalan Wahidin No. 1  
Jakarta Pusat**

Sehubungan dengan surat Saudara/Wakil/Panitera<sup>\*)</sup> Nomor : .....<sup>14)</sup> tanggal .....<sup>15)</sup>  
berkenaan dengan surat banding dari .....<sup>11)</sup> Nomor .....<sup>16)</sup> tanggal .....<sup>17)</sup>  
hal tersebut pada pokok surat, dengan ini disampaikan uraian sebagai berikut:

**I. KETENTUAN FORMAL**

1. Berdasarkan penelitian surat banding pemohon banding Nomor .....<sup>16)</sup> tanggal .....<sup>17)</sup>  
yang diterima di Pengadilan Pajak tanggal .....<sup>18)</sup> diketahui hal-hal sebagai berikut:
  - a. Banding diajukan dengan surat banding dalam Bahasa Indonesia/tidak dalam Bahasa Indonesia<sup>\*)</sup> kepada Pengadilan Pajak;
  - b. Banding diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan/melebihi jangka waktu 3 (tiga) bulan<sup>\*)</sup> sejak tanggal diterima surat keputusan yang dibanding;
  - c. Terhadap 1 (satu) keputusan/lebih dari 1 (satu) keputusan<sup>\*)</sup> diajukan 1 (satu) surat banding;
  - d. Banding diajukan dengan disertai alasan-alasan yang jelas/tanpa disertai alasan yang jelas<sup>\*)</sup> dan mencantumkan/tidak mencantumkan<sup>\*)</sup> tanggal diterima Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor .....<sup>5)</sup> tanggal .....<sup>6)</sup> yang diterima tanggal .....<sup>19)</sup>
  - e. Surat banding dilampiri/tidak dilampiri<sup>\*)</sup> salinan surat keputusan yang dibanding, yaitu Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor .....<sup>5)</sup> tanggal .....<sup>6)</sup>;
  - f. Surat banding dilampiri/tidak dilampiri<sup>\*)</sup> bukti pembayaran 50% atas pajak yang terutang; (khusus untuk tahun pajak 2007 dan sebelumnya).
  - g. Surat banding dilampiri/tidak<sup>\*)</sup> dilampiri bukti pembayaran atas pajak yang masih harus dibayar sesuai yang telah disetujui dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan; (khusus untuk tahun pajak 2008 dan seterusnya)
  - h. Surat Banding ditandatangani oleh pemohon banding (.....<sup>20)</sup> atau kuasanya dengan/ tidak dilampiri<sup>\*)</sup> surat kuasa khusus.
  - i. Surat/skp/keputusan<sup>\*)</sup> yang diajukan banding bukan merupakan objek yang dapat diajukan banding.<sup>\*\*)</sup>
2. Berdasarkan uraian tersebut di atas,
  - a. permohonan banding pemohon banding telah memenuhi/tidak memenuhi<sup>\*)</sup> ketentuan formal sebagaimana diatur dalam Pasal 27 dan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009, Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 36 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) serta Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, sehingga dapat/tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut.<sup>21)</sup>
  - b. Surat/skp/keputusan yang diajukan banding bukan merupakan objek yang dapat diajukan banding sebagaimana dimaksud Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009, dan Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak.<sup>\*\*)</sup>

**II. URAIAN MENGENAI KETETAPAN SEMULA, KEBERATAN DAN KEPUTUSAN ATAS KEBERATAN**

1. Surat Ketetapan Pajak .....<sup>22)</sup> Nomor: .....<sup>8)</sup> tanggal .....<sup>9)</sup> Tahun Pajak .....<sup>10)</sup> diterbitkan berdasarkan Laporan Pemeriksaan Pajak .....<sup>23)</sup> Nomor: .....<sup>24)</sup> tanggal .....<sup>25)</sup>, dengan perhitungan sebagai berikut:

No	Uraian	Jumlah (Rp)		Koreksi (Rp)
		Wajib Pajak	Pemeriksa	
26)	27)	28)	29)	30)

2. Atas ketetapan tersebut, pemohon banding mengajukan Keberatan dengan surat Nomor: .....<sup>31)</sup> tanggal .....<sup>32)</sup>, yang diterima KPP .....<sup>33)</sup> berdasarkan LPAD Nomor: .....<sup>34)</sup> tanggal .....<sup>35)</sup>

3. Atas surat keberatan pemohon banding telah diterbitkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: .....<sup>5)</sup> tanggal .....<sup>6)</sup>, dengan perhitungan sebagai berikut:

Uraian	Semula (Rp)	Ditambah/ (Dikurangi) (Rp)	Menjadi (Rp)
36)	37)	38)	39)

**III. ANALISA POKOK SENGKETA**

Setelah membaca surat banding, mempelajari Laporan Penelitian Keberatan, berkas surat-menyurat yang berlangsung selama proses penyelesaian keberatan, surat keberatan pemohon banding, dengan ini disampaikan analisa pokok sengketa atas surat banding dari pemohon banding sebagai berikut:

Pokok sengketa:

- A. Koreksi .....<sup>40)</sup>
1. Menurut pemohon banding .....<sup>41)</sup>
  2. Menurut terbanding
    - a. Dasar hukum .....<sup>42)</sup>
    - b. Tanggapan terbanding .....<sup>43)</sup>
- B. Koreksi .....<sup>40)</sup>
1. Menurut pemohon banding .....<sup>41)</sup>
  2. Menurut terbanding
    - a. Dasar hukum .....<sup>42)</sup>
    - b. Tanggapan terbanding .....<sup>43)</sup>
- C. dst

**IV. KESIMPULAN DAN USUL**

1. **Kesimpulan**
  - a. Surat banding Nomor .....<sup>16)</sup> tanggal .....<sup>17)</sup> memenuhi/tidak memenuhi ketentuan formal sebagaimana diatur dalam Pasal 27 dan Pasal 32\*) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 dan Pasal 35 ayat (1) dan (2) serta Pasal 36 ayat (1), (2), (3) dan (4) serta Pasal 37 ayat (1)\*) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak.
  - b. Surat/skp/keputusan\*) yang diajukan banding bukan merupakan objek yang dapat diajukan banding sebagaimana dimaksud Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983

tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009, dan Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak.\*\*)

- c. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: .....<sup>5)</sup> tanggal .....<sup>6)</sup> diterbitkan berdasarkan kuasa Pasal 26 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 telah sesuai dengan data dan ketentuan yang berlaku.
- d. Koreksi pemeriksa/penelaah keberatan telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

2. **Usul**

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka diusulkan kepada Pengadilan Pajak untuk:

- a. Menyatakan bahwa permohonan banding Pemohon Banding TIDAK DAPAT DITERIMA karena Surat/skp/keputusan<sup>\*)</sup> yang diajukan banding bukan merupakan objek yang dapat diajukan banding.\*\*)
- b. menolak permohonan banding Pemohon Banding dan tetap mempertahankan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: .....<sup>5)</sup> tanggal .....<sup>6)</sup> tentang Keberatan pemohon banding atas surat ketetapan pajak .....<sup>22)</sup> Nomor: .....<sup>8)</sup> tanggal .....<sup>9)</sup> Tahun Pajak .....<sup>10)</sup> atas nama .....<sup>11)</sup> NPWP .....<sup>12)</sup>

..... 44)

\_\_\_\_\_  
NIP 45)

\*) pilih yang sesuai

\*\*) dicantumkan hanya apabila kondisinya sesuai

## Petunjuk Pengisian Lampiran II

- Angka 1 : diisi dengan unit eselon II yang bersangkutan
- Angka 2 : diisi dengan nomor surat
- Angka 3 : diisi dengan tanggal surat
- Angka 4 : diisi dengan jumlah lampiran
- Angka 5 : diisi dengan nomor Surat Keputusan Keberatan
- Angka 6 : diisi dengan tanggal Surat Keputusan Keberatan
- Angka 7 : diisi sesuai judul dalam Surat Keputusan Keberatan Contoh: "Keberatan atas SKPKB PPh Badan"
- Angka 8 : diisi dengan nomor ketetapan pajak/bukti potong
- Angka 9 : diisi dengan tanggal ketetapan pajak/bukti potong
- Angka 10 : diisi dengan Tahun Pajak/Masa Pajak/Bagian Tahun Pajak yang diajukan permohonan banding
- Angka 11 : diisi Nama Wajib Pajak yang bersangkutan
- Angka 12 : diisi dengan NPWP/NOP yang bersangkutan
- Angka 13 : diisi dengan nomor sengketa pajak sesuai dalam surat permintaan SUB dari Pengadilan Pajak
- Angka 14 : diisi dengan nomor surat permintaan SUB dari Pengadilan Pajak
- Angka 15 : diisi dengan tanggal surat permintaan SUB dari Pengadilan Pajak
- Angka 16 : diisi dengan nomor surat banding Wajib Pajak
- Angka 17 : diisi dengan tanggal surat banding Wajib Pajak
- Angka 18 : diisi dengan tanggal diterimanya surat banding Wajib Pajak di Pengadilan Pajak
- Angka 19 : diisi dengan tanggal diterimanya Surat Keputusan Keberatan oleh Wajib Pajak
- Angka 20 : diisi dengan nama dan jabatan penandatanganan surat banding
- Angka 21 : agar disebutkan secara lengkap dasar hukum yang diacu dalam pemenuhan ketentuan formal
- Angka 22 : diisi dengan jenis surat ketetapan pajak dan jenis pajaknya Contoh: SKPKB PPh Badan
- Angka 23 : diisi dengan nama unit kantor yang menerbitkan Laporan Pemeriksaan Pajak
- Angka 24 : diisi dengan nomor Laporan Pemeriksaan Pajak
- Angka 25 : diisi dengan tanggal Laporan Pemeriksaan Pajak
- Angka 26 : diisi dengan nomor urut
- Angka 27 : diisi dengan uraian item dalam surat ketetapan pajak
- Angka 28 : diisi dengan jumlah menurut Wajib Pajak
- Angka 29 : diisi dengan jumlah menurut Pemeriksa
- Angka 30 : diisi dengan selisih antara jumlah menurut Wajib Pajak dengan jumlah menurut Pemeriksa
- Angka 31 : diisi dengan nomor surat permohonan keberatan Wajib Pajak
- Angka 32 : diisi dengan tanggal surat permohonan keberatan Wajib Pajak
- Angka 33 : diisi dengan nama KPP yang menerima surat permohonan keberatan Wajib Pajak
- Angka 34 : diisi dengan nomor LPAD
- Angka 35 : diisi dengan tanggal LPAD
- Angka 36 : diisi dengan uraian item dalam Surat Keputusan Keberatan
- Angka 37 : diisi dengan jumlah semula sebelum keputusan keberatan
- Angka 38 : diisi dengan penambahan/pengurangan keputusan keberatan
- Angka 39 : diisi dengan jumlah setelah keputusan keberatan
- Angka 40 : diisi dengan jenis koreksi pemeriksa sebagaimana yang dipertahankan oleh Penelaah Keberatan (bahas satu per satu koreksi pemeriksa)
- Angka 41 : diisi dengan alasan banding terhadap item yang dikoreksi pemeriksa
- Angka 42 : diisi dengan dasar hukum yang digunakan terbanding dalam rangka mempertahankan koreksi pemeriksa
- Angka 43 : diisi dengan alasan/argumentasi terbanding dalam rangka mempertahankan koreksi pemeriksa
- Angka 44 : diisi dengan nama jabatan penandatanganan Surat Uraian Banding atas nama Dirjen Pajak
- Angka 45 : diisi dengan tanda tangan, nama, dan NIP pejabat yang menandatangani Surat Uraian Banding

**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
 DIREKTORAT JENDERAL PAJAK**

.....<sup>1)</sup>

**MATRIKS SENGKETA**

Identitas Pemohon Banding  
 Nama : .....<sup>2)</sup>  
 NPWP / NOP : .....<sup>3)</sup>  
 Jenis dan Masa/Tahun Pajak : .....<sup>4)</sup>  
 No. Ketetapan : .....<sup>5)</sup>  
 No. Keputusan : .....<sup>6)</sup>

No	Jenis sengketa	Cfm SPT	Cfm Skp	Koreksi	Permohonan Keberatan	Keputusan Keberatan	Koreksi Keb-SPT	Koreksi Keb-Skp	Permohonan Banding
1	2	3	4	5 (4 - 3)	6	7	8 (7 - 3)	9 (7 - 4)	10
7)	8)	9)	10)	11)	12)	13)	14)	15)	16)

.....<sup>17)</sup>  
 .....<sup>18)</sup>

.....<sup>19)</sup>  
 NIP



Petunjuk Pengisian Lampiran III:

- Angka 1 : diisi dengan unit kerja yang bersangkutan
- Angka 2 : diisi dengan nama Pemohon Banding
- Angka 3 : diisi dengan NPWP/NOP Pemohon Banding
- Angka 4 : diisi dengan Jenis dan Masa/Tahun Pajak
- Angka 5 : diisi dengan nomor dan tanggal skp/STP yang diajukan permohonan oleh Wajib Pajak
- Angka 6 : diisi dengan nomor dan tanggal keputusan yang diajukan permohonan oleh Wajib Pajak
- Angka 7 : diisi dengan nomor urut
- Angka 8 : diisi dengan uraian jenis sengketa, contoh: \*koreksi atas biaya promosi sebesar Rp ....\*
- Angka 9 : diisi dengan jumlah menurut SPT
- Angka 10 : diisi dengan jumlah menurut surat ketetapan pajak
- Angka 11 : diisi dengan jumlah koreksi
- Angka 12 : diisi dengan jumlah yang diajukan keberatan
- Angka 13 : diisi dengan jumlah menurut keputusan keberatan
- Angka 14 : diisi dengan selisih antara keputusan keberatan dengan SPT
- Angka 15 : diisi dengan selisih antara keputusan keberatan dengan surat ketetapan pajak
- Angka 16 : diisi dengan jumlah yang diajukan banding
- Angka 17 : diisi dengan nama kota dan tanggal
- Angka 18 : diisi dengan nama jabatan unit eselon III
- Angka 19 : diisi dengan tanda tangan, nama dan NIP pejabat eselon III

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

.....<sup>1)</sup>

Nomor : .....<sup>2)</sup> .....<sup>3)</sup>  
Sifat : Segera  
Lampiran : .....<sup>4)</sup> set  
Hal : Surat Tanggapan atas Pengajuan Gugatan terhadap Surat  
Keputusan/objek gugatan lainnya (sesuai Pasal 23 UU KUP)  
Nomor : .....<sup>5)</sup>  
Tanggal : .....<sup>6)</sup>  
Tentang : .....<sup>7)</sup>  
Atas nama : .....<sup>8)</sup>  
NPWP : .....<sup>9)</sup>  
Nomor Sengketa Pajak : .....<sup>10)</sup>

**Yth. Sekretaris Pengadilan Pajak  
Gedung Sutikno Slamet  
Jalan Dr. Wahidin No. 1  
Jakarta Pusat**

Sehubungan dengan surat Saudara/Wakil Panitera Nomor .....<sup>11)</sup> tanggal .....<sup>12)</sup>  
berkenaan dengan surat permohonan gugatan dari .....<sup>8)</sup> Nomor .....<sup>13)</sup> tanggal .....<sup>14)</sup>  
hal tersebut pada pokok surat, dengan ini disampaikan uraian sebagai berikut.

**I. KETENTUAN FORMAL**

1. Berdasarkan penelitian surat permohonan gugatan penggugat Nomor: .....<sup>13)</sup> tanggal .....<sup>14)</sup> yang diterima di Pengadilan Pajak tanggal .....<sup>15)</sup>, diketahui hal-hal sebagai berikut:
  - a. Gugatan diajukan dengan surat gugatan dalam Bahasa Indonesia/tidak dalam Bahasa Indonesia\*) kepada Pengadilan Pajak;
  - b. Gugatan diajukan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari/melebihi jangka waktu 30 (tiga puluh) hari\*) sejak tanggal diterima surat keputusan yang digugat atau dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari/melebihi jangka waktu 14 (empat belas) hari\*) sejak tanggal pelaksanaan penagihan;
  - c. Terhadap 1 (satu) objek gugatan/lebih dari satu objek gugatan\*) diajukan 1 (satu) Surat Gugatan;
  - d. Gugatan diajukan dengan disertai alasan-alasan yang jelas/tanpa disertai alasan yang jelas\*) dan mencantumkan/tidak mencantumkan\*) tanggal diterima, Surat Keputusan/objek gugatan lainnya yang diterima .....<sup>16)</sup>
  - e. Surat Gugatan dilampiri/tidak dilampiri\*) salinan dokumen yang digugat, yaitu (sebutkan sesuai dengan dokumen yang diajukan gugatan)
  - f. Surat Gugatan ditandatangani oleh penggugat (.....<sup>17)</sup>) atau kuasa penggugat yang dilampiri/tidak\*) dilampiri surat kuasa khusus.
  - g. Surat/skp/keputusan\*) yang diajukan gugatan bukan merupakan objek yang dapat diajukan gugatan\*\*)
2. Berdasarkan uraian tersebut di atas:
  - a. permohonan penggugat telah memenuhi/tidak memenuhi\*) ketentuan formal sebagaimana diatur dalam Pasal 23 dan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 dan Pasal 40 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) serta Pasal 41\*) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, sehingga dapat/tidak dapat\*) dipertimbangkan lebih lanjut.<sup>18)</sup>
  - b. Surat keputusan/skp/objek gugatan lainnya\*) keputusan yang diajukan gugatan bukan merupakan objek yang dapat diajukan gugatan\*) sebagaimana dimaksud Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009, dan Pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011, serta Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak.\*\*) )

**II. URAIAN MENGENAI OBJEK GUGATAN**

Surat Keputusan/skp/objek gugatan lainnya\*) Nomor .....<sup>5)</sup> tanggal .....<sup>6)</sup> diterbitkan berdasarkan .....<sup>19)</sup>

.....  
.....

**III. URAIAN SURAT GUGATAN**

Terhadap Surat Keputusan/skp/objek gugatan lainnya\*) Nomor .....<sup>5)</sup> tanggal .....<sup>6)</sup>,  
penggugat mengajukan gugatan dengan surat Nomor: .....<sup>13)</sup> tanggal .....<sup>14)</sup>,  
dengan alasan sebagai berikut: .....<sup>20)</sup>  
.....

**IV. TANGGAPAN ATAS GUGATAN**

Setelah membaca surat gugatan, mempelajari berkas surat menyurat dan dokumen yang ada, dengan ini disampaikan tanggapan terhadap gugatan dari penggugat sebagai berikut:

- a. Dasar hukum : .....<sup>21)</sup>
- b. Tanggapan tergugat : .....<sup>22)</sup>

**V. KESIMPULAN DAN USUL**

**1. Kesimpulan**

- a. Surat gugatan penggugat Nomor .....<sup>13)</sup> tanggal .....<sup>14)</sup> memenuhi/tidak memenuhi\*) ketentuan formal sebagaimana diatur dalam Pasal 23 dan Pasal 32\*) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 dan Pasal 40 ayat (1), ayat (2) atau ayat (3) dan Pasal 41\*) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak.<sup>18)</sup>
- b. Surat Keputusan/skp/objek gugatan lainnya\*) yang diajukan gugatan bukan merupakan objek yang dapat diajukan gugatan\*) sebagaimana dimaksud Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009, dan Pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011, serta Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak.\*\*)
- c. Surat Keputusan/skp/objek gugatan lainnya\*) Nomor: .....<sup>5)</sup> tanggal .....<sup>6)</sup> diterbitkan sesuai dengan data dan ketentuan yang berlaku.

**2. Usul**

- Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka diusulkan kepada Pengadilan Pajak untuk:
- a. menyatakan bahwa permohonan gugatan Penggugat TIDAK DAPAT DITERIMA karena Surat Keputusan/skp/objek gugatan lainnya yang diajukan gugatan bukan merupakan objek yang dapat diajukan gugatan.
  - b. menolak permohonan gugatan penggugat dan tetap mempertahankan Surat Keputusan/skp/objek gugatan lainnya\*) Nomor: .....<sup>5)</sup> tanggal .....<sup>6)</sup> tentang .....<sup>7)</sup> atas nama .....<sup>8)</sup> NPWP: .....<sup>9)</sup>

.....<sup>23)</sup>

.....<sup>24)</sup>  
NIP

\*) diisi dengan yang sesuai  
\*\*) dicantumkan hanya apabila kondisinya sesuai

Petunjuk Pengisian Lampiran IV:

- Angka 1 : diisi dengan unit eselon II yang bersangkutan
- Angka 2 : diisi dengan nomor surat
- Angka 3 : diisi dengan tanggal surat
- Angka 4 : diisi dengan jumlah lampiran
- Angka 5 : diisi dengan nomor keputusan/dokumen yang digugat
- Angka 6 : diisi dengan tanggal keputusan/dokumen yang digugat
- Angka 7 : diisi sesuai judul dalam dokumen yang digugat
- Angka 8 : diisi dengan Nama Wajib Pajak yang bersangkutan
- Angka 9 : diisi dengan NPWP yang bersangkutan
- Angka 10 : diisi dengan nomor sengketa pajak sesuai dalam surat permintaan dari Pengadilan Pajak
- Angka 11 : diisi dengan nomor surat permintaan Surat Tanggapan (ST) dari Pengadilan Pajak
- Angka 12 : diisi dengan tanggal surat permintaan Surat Tanggapan (ST) dari Pengadilan Pajak
- Angka 13 : diisi dengan nomor surat gugatan Wajib Pajak
- Angka 14 : diisi dengan tanggal surat gugatan Wajib Pajak
- Angka 15 : diisi dengan tanggal diterimanya surat gugatan Wajib Pajak di Pengadilan Pajak
- Angka 16 : diisi dengan tanggal diterimanya Surat Keputusan/objek gugatan lainnya yang diajukan gugatan oleh Wajib Pajak
- Angka 17 : diisi dengan nama dan jabatan penandatanganan surat gugatan
- Angka 18 : agar disebutkan secara lengkap pasal yang terpenuhi dan pasal yang tidak terpenuhi dalam pemenuhan ketentuan formal pengajuan permohonan gugatan
- Angka 19 : diisi dengan uraian secara rinci mengenai objek yang digugat
- Angka 20 : diisi dengan alasan gugatan sesuai dengan surat gugatan Wajib Pajak
- Angka 21 : diisi dengan dengan dasar hukum yang digunakan tergugat dalam rangka mempertahankan koreksi pemeriksa/materi sengketa
- Angka 22 : diisi dengan alasan/argumentasi tergugat dalam rangka mempertahankan koreksi pemeriksa/materi sengketa
- Angka 23 : diisi dengan nama jabatan penandatanganan Surat Tanggapan atas nama Dirjen Pajak
- Angka 24 : diisi dengan nama, NIP dan tanda tangan pejabat yang menandatangani Surat Tanggapan



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA**  
**DIREKTORAT JENDERAL PAJAK**  
 .....<sup>1)</sup>

**SURAT TUGAS**  
 No. ST .....<sup>2)</sup>

Direktur Keberatan dan Banding/Kepala Kantor Wilayah\*) menugaskan:

No	Nama	NIP	Jabatan
1.	..... <sup>3)</sup>	..... <sup>4)</sup>	..... <sup>5)</sup>
2.			

untuk menghadiri sidang berdasarkan surat panggilan nomor\*) .....<sup>6)</sup> tanggal .....<sup>7)</sup> dan memberikan penjelasan-penjelasan yang diperlukan secara lisan mengenai permohonan banding/gugatan\*) atas nama:

No	Nama Pemohon Banding/Gugatan*)	Nomor Keputusan	Jenis & Tahun Pajak
1.	..... <sup>8)</sup>	..... <sup>9)</sup>	..... <sup>10)</sup>
2.			

Yang diselenggarakan pada:

Hari : .....<sup>11)</sup>  
 Tanggal : .....<sup>12)</sup>  
 Waktu : .....<sup>13)</sup>  
 Tempat : .....<sup>14)</sup>  
 .....

Demikian untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Kolom Validasi (diisi oleh Panitera)
Sidang dilaksanakan pada: Tanggal : ..... Jam Mulai : ..... Jam Selesai : .....

.....<sup>15)</sup>  
 .....<sup>16)</sup>  
 .....<sup>17)</sup>  
 NIP

\*) Pilih yang sesuai

Petunjuk Pengisian Lampiran V:

- Angka 1 : diisi dengan unit eselon II yang bersangkutan (d disesuaikan dengan format kepala surat)
- Angka 2 : diisi dengan nomor surat tugas
- Angka 3 : diisi dengan nama anggota Tim Sidang
- Angka 4 : diisi dengan NIP anggota Tim Sidang
- Angka 5 : diisi dengan jabatan anggota Tim Sidang
- Angka 6 : diisi dengan nomor surat panggilan sidang
- Angka 7 : diisi dengan tanggal surat panggilan sidang
- Angka 8 : diisi dengan nama pemohon banding/penggugat
- Angka 9 : diisi dengan nomor keputusan yang dibanding/digugat
- Angka 10 : diisi dengan jenis dan tahun pajak yang dibanding/digugat
- Angka 11 : diisi dengan hari persidangan
- Angka 12 : diisi dengan tanggal persidangan
- Angka 13 : diisi dengan waktu/jam persidangan
- Angka 14 : diisi dengan ruang dan tempat persidangan
- Angka 15 : diisi dengan nama kota dan tanggal Surat Tugas
- Angka 16 : diisi dengan nama jabatan yang menerbitkan Surat Tugas
- Angka 17 : diisi dengan nama, NIP dan tanda tangan pejabat yang menerbitkan Surat Tugas

**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK**

.....<sup>1)</sup>

**RESUME POKOK SENGKETA BANDING**

Identitas Pemohon Banding

Nama : .....<sup>2)</sup>  
NPWP / NOP : .....<sup>3)</sup>  
Jenis dan Masa/Tahun Pajak : .....<sup>4)</sup>  
No. Ketetapan : .....<sup>5)</sup>  
No. Keputusan : .....<sup>6)</sup>

No	Koreksi Pemeriksa dan Alasannya	Keberatan Wajib Pajak	Keputusan Keberatan	Bandung Wajib Pajak	Pendapat Terbanding
1	2	3	4	5	6
7)	8)	9)	10)	11)	12)

.....<sup>13)</sup>  
.....<sup>14)</sup>

.....<sup>15)</sup>  
NIP

#### Petunjuk Pengisian Lampiran VIa

- Angka 1 : diisi dengan unit kerja yang bersangkutan
- Angka 2 : diisi dengan nama Pemohon Banding
- Angka 3 : diisi dengan NPWP/NOP Pemohon Banding
- Angka 4 : diisi dengan Jenis dan Masa/Tahun Pajak
- Angka 5 : diisi dengan nomor dan tanggal skp yang diajukan permohonan oleh Wajib Pajak
- Angka 6 : diisi dengan nomor dan tanggal Keputusan yang diajukan permohonan oleh Wajib Pajak
- Angka 7 : diisi dengan nomor urut
- Angka 8 : diisi dengan uraian koreksi pemeriksa dan alasannya
- Angka 9 : diisi dengan uraian keberatan Wajib Pajak
- Angka 10 : diisi dengan uraian keputusan keberatan
- Angka 11 : diisi dengan uraian Banding
- Angka 12 : diisi dengan uraian pendapat Terbanding
- Angka 13 : diisi dengan nama kota dan tanggal surat
- Angka 14 : diisi dengan nama jabatan unit eselon III
- Angka 15 : diisi dengan tanda tangan, nama dan NIP pejabat eselon III



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK**

.....<sup>1)</sup>

**RESUME POKOK SENGKETA GUGATAN**

Identitas Penggugat

Nama : .....<sup>2)</sup>  
NPWP : .....<sup>3)</sup>  
Jenis dan Masa/Tahun Pajak : .....<sup>4)</sup>  
No. Ketetapan : .....<sup>5)</sup>  
No. Keputusan : .....<sup>6)</sup>

No	Obyek gugatan	Gugatan Wajib Pajak	Pendapat Tergugat
1	2	3	4
7)	8)	9)	10)

.....<sup>11)</sup>  
.....<sup>12)</sup>

.....<sup>13)</sup>  
NIP

Petunjuk Pengisian Lampiran VIb:

- Angka 1 : diisi dengan unit kerja yang bersangkutan
- Angka 2 : diisi dengan nama Penggugat
- Angka 3 : diisi dengan NPWP Penggugat
- Angka 4 : diisi dengan Jenis dan Masa/Tahun Pajak
- Angka 5 : diisi dengan nomor dan tanggal skp yang diajukan permohonan oleh Wajib Pajak
- Angka 6 : diisi dengan nomor dan tanggal Keputusan yang diajukan permohonan oleh Wajib Pajak
- Angka 7 : diisi dengan nomor urut
- Angka 8 : diisi dengan uraian uraian tentang obyek gugatan
- Angka 9 : diisi dengan uraian gugatan Wajib Pajak
- Angka 10 : diisi dengan uraian pendapat Tergugat
- Angka 11 : diisi dengan nama kota dan tanggal surat
- Angka 12 : diisi dengan nama jabatan unit eselon III
- Angka 13 : diisi dengan nama, NIP dan tanda tangan pejabat eselon III



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA**  
**DIREKTORAT JENDERAL PAJAK**  
 .....<sup>1)</sup>

Nomor : .....<sup>2)</sup> .....<sup>3)</sup>  
 Sifat : Segera  
 Hal : Permintaan Untuk Menghadirkan Pemeriksa atau Peneliti/Penelaah  
 keberatan/*Account Representative*/Juru Sita/Pegawai lainnya\*)  
 dalam Rangka Pembahasan Materi/Sidang Banding/Gugatan\*)

Yth. ....<sup>4)</sup>  
 Jalan .....  
 .....

Sehubungan dengan sidang sengketa banding/gugatan yang diajukan oleh .....<sup>5)</sup> NPWP  
 .....<sup>6)</sup> terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor:

No	Keputusan	SKP			LPP
		Jenis	Nomor	Masa/Thn	
1.	..... <sup>7)</sup>	..... <sup>8)</sup>	..... <sup>9)</sup>	..... <sup>10)</sup>	..... <sup>11)</sup>
2.					

dengan ini diminta bantuannya untuk menugaskannya Pemeriksa atau Peneliti/Penelaah keberatan/*Account Representative*/Juru Sita/Pegawai lainnya\*) berikut ini:

No.	Nama	NIP
1.	..... <sup>12)</sup>	..... <sup>13)</sup>

untuk menghadiri pembahasan materi/sidang banding/gugatan\*) yang akan diadakan pada:

Hari/Tanggal	Pukul	Perihal	Tempat
..... <sup>14)</sup>	..... <sup>15)</sup>	pembahasan materi/sidang banding/ gugatan*)	..... <sup>16)</sup>

dengan membawa dokumen pendukung, antara lain:

- a. ....<sup>17)</sup>
- b. ....

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.

.....<sup>18)</sup>

.....<sup>19)</sup>  
 NIP

\*) Pilih yang sesuai

Petunjuk Pengisian Lampiran VII:

- Angka 1 : diisi dengan nama unit eselon II yang bersangkutan (d disesuaikan dengan format kepala surat)
- Angka 2 : diisi dengan nomor surat
- Angka 3 : diisi dengan tanggal surat
- Angka 4 : diisi dengan nama dan alamat kantor yang dituju
- Angka 5 : diisi dengan nama pemohon banding/gugatan
- Angka 6 : diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) pemohon banding/gugatan
- Angka 7 : diisi dengan nomor dan tanggal Keputusan Direktur Jenderal Pajak yang diajukan banding/gugatan
- Angka 8 : diisi dengan jenis skp/STP, Jenis Pajak  
contoh: "SKPKB PPh Badan"  
(dalam hal sidang gugatan tidak perlu diisi)
- Angka 9 : diisi dengan nomor Surat Ketetapan Pajak (nomor kohir)  
(dalam hal sidang gugatan tidak perlu diisi)
- Angka 10 : diisi dengan Masa Pajak/Tahun Pajak  
(dalam hal sidang gugatan tidak perlu diisi)
- Angka 11 : diisi dengan nomor dan tanggal Laporan Pemeriksaan Pajak  
(dalam hal sidang gugatan tidak perlu diisi)
- Angka 12 : diisi dengan nama Pemeriksa atau Peneliti/Penelaah Keberatan/*Account Representative*/Juru Sita/Pegawai yang dipanggil
- Angka 13 : diisi dengan NIP Pemeriksa atau Peneliti/Penelaah Keberatan/*Account Representative*/Juru Sita/Pegawai yang dipanggil
- Angka 14 : diisi dengan nama hari dan tanggal pembahasan materi atau sidang banding/gugatan yang akan dilaksanakan
- Angka 15 : diisi dengan waktu pembahasan materi atau sidang banding/gugatan yang akan dilaksanakan
- Angka 16 : diisi dengan tempat pembahasan materi atau sidang banding/gugatan yang akan dilaksanakan  
contoh:  
Ruang Rapat Subdit Banding dan Gugatan I  
Gedung Utama Lt. 18 Kantor Pusat DJP  
Jalan Jend. Gatot Subroto Kav. 40-42, Jakarta
- Angka 17 : diisi dengan data/dokumen yang harus dibawa dan disiapkan oleh Pemeriksa atau Peneliti/Penelaah Keberatan/*Account Representative*/Juru Sita/Pegawai
- Angka 18 : diisi dengan kepala unit kantor yang menerbitkan Surat Panggilan
- Angka 19 : diisi dengan nama, NIP dan tanda tangan pejabat yang menerbitkan Surat Panggilan

**DIREKTORAT JENDERAL PAJAK**  
.....1)

**LAPORAN HASIL PEMBAHASAN**

---

Wajib Pajak : ..... 2)  
NPWP : ..... 3)  
KEP. yang dibanding/digugat : ..... 4)  
Jenis dan Masa/Tahun Pajak : ..... 5)  
Tempat : ..... 6)  
Tanggal : ..... 7)  
Jam : ..... 8)

---

**I. PESERTA**

1. .... 9)
2. ....
3. ....

**II. SENGKETA**

.....  
.....  
..... 10)

**III. PEMBAHASAN**

.....  
.....  
..... 11)

**III. KESIMPULAN**

.....  
.....  
..... 12)

Jakarta, ..... 13)

..... 14)  
NIP

Petunjuk Pengisian Lampiran VII:

- Angka 1 : diisi dengan unit kerja eselon II yang bersangkutan
- Angka 2 : diisi dengan nama Pemohon Banding
- Angka 3 : diisi dengan NPWP/NOP Pemohon Banding
- Angka 4 : diisi dengan nomor dan tanggal keputusan yang diajukan banding/gugatan oleh Wajib Pajak
- Angka 5 : diisi dengan Jenis dan Masa/Tahun Pajak
- Angka 6 : diisi dengan tempat dilakukannya pembahasan
- Angka 7 : diisi dengan tanggal dilakukannya pembahasan
- Angka 8 : diisi dengan jam dilakukannya pembahasan
- Angka 9 : diisi dengan nama dan jabatan pegawai yang menghadiri pembahasan
- Angka 10 : diisi dengan uraian mengenai sengketa
- Angka 11 : diisi dengan uraian mengenai jalannya pembahasan
- Angka 12 : diisi dengan kesimpulan dari pembahasan
- Angka 13 : diisi dengan tanggal laporan
- Angka 14 : diisi dengan tanda tangan, nama, dan NIP petugas pembuat laporan

**LAPORAN HASIL SIDANG DI PENGADILAN PAJAK**

No : LS ..... <sup>1)</sup> tanggal ..... <sup>2)</sup>			No Sengketa : ..... <sup>3)</sup>		
<b>1. PEMOHON BANDING/PENGGUGAT</b>			<b>2. PETUGAS YANG MENGHADIRI SIDANG</b>		
a.	Nama	: ..... <sup>4)</sup>	a.	Nama	: ..... <sup>9)</sup>
b.	NPWP/NOP	: ..... <sup>5)</sup>		NIP	: ..... <sup>10)</sup>
c.	No. KEP yg dibanding/digugat	: ..... <sup>6)</sup>	b.	Nama	: ..... <sup>9)</sup>
d.	Jenis dan Masa/Tahun Pajak	: ..... <sup>7)</sup>		NIP	: ..... <sup>10)</sup>
e.	Jumlah yang dibanding	: ..... <sup>8)</sup>	c.	Nama	: ..... <sup>9)</sup>
				NIP	: ..... <sup>10)</sup>
					..... <sup>11)</sup>
					..... <sup>11)</sup>
					..... <sup>11)</sup>
					..... <sup>11)</sup>
					..... <sup>11)</sup>
					..... <sup>11)</sup>
Persidangan Ke -	Hari / tanggal :	Majelis :	Nama Hakim	Kuasa Hukum PB /PG:	
..... <sup>12)</sup>	..... <sup>13)</sup>	..... <sup>14)</sup>	1. .... <sup>15)</sup>	1. .... <sup>16)</sup>	
			2. .... <sup>15)</sup>	2. .... <sup>16)</sup>	
			3. .... <sup>15)</sup>	3. .... <sup>16)</sup>	

No.	Pokok Sengketa	Uraian Jalannya Sidang
1.	..... <sup>17)</sup>	..... <sup>18)</sup>
		Sidang dilanjutkan tanggal ..... <sup>19)</sup> /dinyatakan cukup*)

Kepala Seksi .....<sup>20)</sup>

Mengetahui,  
 Kasubdit/Kabid .....<sup>21)</sup>

.....<sup>22)</sup>  
 NIP

.....<sup>23)</sup>  
 NIP

\*) pilih yang sesuai

Petunjuk Pengisian Lampiran IX:

- Angka 1 : diisi dengan nomor Laporan Sidang
- Angka 2 : diisi dengan tanggal Laporan Sidang
- Angka 3 : diisi dengan nomor Sengketa (tercantum dalam surat permintaan Surat Uraian Banding/Surat Tanggapan)
- Angka 4 : diisi dengan nama Pemohon Banding/Penggugat
- Angka 5 : diisi dengan NPWP/NOP Pemohon Banding/Penggugat
- Angka 6 : diisi dengan nomor Keputusan yang dibanding/digugat
- Angka 7 : diisi dengan Jenis dan Masa/Tahun Pajak
- Angka 8 : diisi dengan nilai pajak yang diajukan banding, dalam hal sidang gugatan tidak perlu diisi
- Angka 9 : diisi dengan nama petugas yang ditunjuk menghadiri sidang
- Angka 10 : diisi dengan NIP petugas yang ditunjuk menghadiri sidang
- Angka 11 : diisi dengan tanda tangan petugas yang ditunjuk menghadiri sidang
- Angka 12 : diisi dengan angka persidangan yang ke berapa
- Angka 13 : diisi dengan hari dan tanggal persidangan dilakukan
- Angka 14 : diisi dengan Majelis Hakim yang melakukan persidangan
- Angka 15 : diisi dengan nama Hakim yang melakukan persidangan
- Angka 16 : diisi dengan nama yang mewakili pemohon banding/penggugat dipersidangan
- Angka 17 : diisi dengan pokok sengketa
- Angka 18 : diisi dengan semua informasi tentang jalannya persidangan berisi pendapat Terbanding/Tergugat, Pemohon Banding/Penggugat maupun Majelis
- Angka 19 : diisi dengan tanggal sidang berikutnya akan dilanjutkan
- Angka 20 : diisi dengan nama jabatan eselon IV
- Angka 21 : diisi dengan nama jabatan eselon III
- Angka 22 : diisi dengan nama, NIP dan tanda tangan pejabat eselon IV
- Angka 23 : diisi dengan nama, NIP dan tanda tangan pejabat eselon III



**DAFTAR ISI ARSIP SIDANG BANDING**

- NOMOR SENGKETA : ..... 1)  
 OBJEK YANG DIBANDING : ..... 2)  
 TANGGAL : ..... 3)  
 NAMA WAJIB PAJAK : ..... 4)  
 NPWP : ..... 5)  
 JENIS PAJAK : ..... 6)  
 MASA/TAHUN PAJAK : ..... 7)  
 NOMOR KETETAPAN PAJAK : ..... 8)  
 TANGGAL KETETAPAN PAJAK : ..... 9)

NO	NAMA DOKUMEN	IDENTIFIKASI			JUMLAH LEMBAR	KET**) (ASLI/FC)
		ADA		TIDAK ADA*)		
		NOMOR	TANGGAL			
<b>A</b>	<b>ARSIP PEMERIKSAAN</b>					
1	Laporan Pemeriksaan Pajak					
2	Kertas Kerja Pemeriksaan					
3	SKP/STP					
4	Bukti Kirim SKP/STP					
<b>B</b>	<b>ARSIP KEBERATAN</b>					
4	Surat Permohonan Keberatan					
5	Surat Keputusan Keberatan					
6	Laporan Penelitian Keberatan					
7	Kertas Kerja Penelitian Keberatan					
8	Bukti Kirim SK Keberatan					
<b>C</b>	<b>ARSIP BANDING</b>					
9	Surat Permohonan Banding					
10	Surat Permintaan SUB					
11	Surat Uraian Banding (SUB)					
12	Surat Bantahan Wajib Pajak atas SUB					
13	Surat Tugas Sidang ke-1					
	Surat Tugas Sidang ke-2					
	Surat Tugas Sidang ke 3					
	dst.					
14	Laporan Hasil Sidang ke-1					
	Laporan Hasil Sidang ke-2					
	Laporan Hasil Sidang ke-3					
	dst.					
15	Arsip Lainnya (Jika Ada)					
	a. Bukti SSP Pembayaran 50%					
	b. Surat Kuasa Khusus					
	c. Resume Pokok Sengketa (Pra Sidang)					
	d. Laporan Hasil Pembahasan					
	e. BA Hasil Uji Bukti					
	f. Penjelasan Tertulis					
	g. dst.					

\*) Tulis huruf "v" jika tidak ada dokumen

\*\*) Pilih "Asli" jika asli atau "FC" jika fotokopi

Tanggal .....201

**Dokumen di dalam bundel berkas diurutkan sesuai daftar isi**

Petugas Inventaris Arsip Kasi .....<sup>10)</sup>

Petugas Penerima Arsip Kasi .....<sup>11)</sup>

.....<sup>12)</sup>

.....<sup>13)</sup>

.....<sup>14)</sup>

.....<sup>15)</sup>

NIP

NIP

NIP

NIP

#### Petunjuk Pengisian Lampiran Xa

- Angka 1 : diisi dengan nomor sengketa
- Angka 2 : diisi dengan objek yang diajukan banding
- Angka 3 : diisi dengan tanggal objek yang diajukan banding
- Angka 4 : diisi dengan nama Wajib Pajak
- Angka 5 : diisi dengan nomor NPWP
- Angka 6 : diisi dengan Jenis Pajak
- Angka 7 : diisi dengan Masa/Tahun Pajak
- Angka 8 : diisi dengan nomor surat ketetapan pajak
- Angka 9 : diisi dengan tanggal surat ketetapan pajak
- Angka 10 : diisi dengan nama jabatan eselon IV atasan petugas inventaris arsip
- Angka 11 : diisi dengan nama jabatan eselon IV atasan petugas penerima arsip
- Angka 12 : diisi dengan nama, NIP dan tanda tangan petugas inventaris arsip
- Angka 13 : diisi dengan nama, NIP dan tanda tangan atasan petugas inventaris arsip
- Angka 14 : diisi dengan nama, NIP dan tanda tangan petugas penerima arsip
- Angka 15 : diisi dengan nama, NIP dan tanda tangan atasan petugas penerima arsip

**DAFTAR ISI ARSIP SIDANG GUGATAN**

- NOMOR SENGKETA : .....1)
- OBJEK YANG DIGUGAT : .....2)
- TANGGAL : .....3)
- NAMA WAJIB PAJAK : .....4)
- NPWP : .....5)
- JENIS PAJAK : .....6)
- MASA/TAHUN PAJAK : .....7)

NO	NAMA DOKUMEN	IDENTIFIKASI			JUMLAH LEMBAR	KET**) (ASLI/FC)
		ADA		TIDAK ADA*)		
		NOMOR	TANGGAL			
<b>A</b>	<b>ARSIP GUGATAN</b>					
1	Objek yang Digugat					
2	Fotokopi bukti pengiriman objek yang digugat					
3	Surat permohonan Gugatan Wajib Pajak					
4	Surat Permintaan Tanggapan					
5	Surat Tanggapan atas Gugatan					
6	Surat Bantahan Wajib Pajak atas Surat Tanggapan					
7	Surat Tugas Sidang ke-1					
	Surat Tugas Sidang ke-2					
	Surat Tugas Sidang ke-3					
	dst.					
8	Laporan Hasil Sidang ke-1					
	Laporan Hasil Sidang ke-2					
	Laporan Hasil Sidang ke-3					
	dst.					
<b>B</b>	<b>Arsip Lainnya (Jika Ada)</b>					
1	Surat Kuasa Khusus					
2	Resume Pokok Sengketa (Pra Sidang)					
3	Laporan Hasil Pembahasan					
4	BA Hasil Uji Bukti					
5	Penjelasan Tertulis					
6	Laporan Penelitian Objek Gugatan					
7	Kertas Kerja Pemeriksaan					
	dst.					

\*) Tulis huruf "v" jika tidak ada dokumen

\*\*) Pilih "Asli" jika asli atau "FC" jika fotokopi

Tanggal .....201

**Dokumen di dalam bundel berkas diurutkan sesuai daftar isi**

Petugas Inventaris Arsip

Kasi .....8)

Petugas Penerima Arsip

Kasi .....9)

.....10)  
 NIP

.....11)  
 NIP

.....12)  
 NIP

.....13)  
 NIP

#### Petunjuk Pengisian Lampiran Xb

- Angka 1 : diisi dengan nomor sengketa
- Angka 2 : diisi dengan objek yang digugat
- Angka 3 : diisi dengan tanggal objek yang digugat
- Angka 4 : diisi dengan nama Wajib Pajak
- Angka 5 : diisi dengan nomor NPWP
- Angka 6 : diisi dengan Jenis Pajak
- Angka 7 : diisi dengan Masa/Tahun Pajak
- Angka 8 : diisi dengan nama jabatan eselon IV atasan petugas inventaris arsip
- Angka 9 : diisi dengan nama jabatan eselon IV atasan petugas penerima arsip
- Angka 10 : diisi dengan nama, NIP dan tanda tangan petugas inventaris arsip
- Angka 11 : diisi dengan nama, NIP dan tanda tangan atasan petugas inventaris arsip
- Angka 12 : diisi dengan nama, NIP dan tanda tangan petugas penerima arsip
- Angka 13 : diisi dengan nama, NIP dan tanda tangan atasan petugas penerima arsip